

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Profil Bapak Budi sebagai wajib pajak

Bapak Budi sudah menikah dan memiliki tiga orang anak, berumur 49 tahun serta memperoleh gelar sarjana ekonomi. Bapak Budi adalah seorang jasa perantara dan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri yaitu berprofesi sebagai seorang makelar kendaraan dan tidak menggunakan biro dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena melakukan pekerjaan bebas, maka Bapak Budi melaporkan SPT Tahunannya menggunakan formulir 1770. Bapak Budi menjadi wajib pajak sejak tahun 2005, setiap bulan menyeter PPh pasal 25 dengan tepat waktu, serta melaporkan SPT tahunan dengan tertib dan membayar kurang bayar dalam SPT tahunan yaitu PPh pasal 29 setiap tahun. Besarnya penghasilan atau peredaran usaha yang diperoleh Bapak Budi dari bulan januari sampai desember pada tahun 2012 sebagai jasa perantara adalah Rp 185.891.133,-. Berikut ini adalah rincian peredaran bruto Bapak Budi selama tahun 2012 :

Tabel 4.1

Rincian Peredaran Usaha 2012

Masa	Peredaran Usaha
Januari	19,450,708
Februari	17,400,300
Maret	17,300,509
April	14,560,000
Mei	12,500,800
Juni	10,320,900
Juli	14,750,407
Agustus	15,670,000
September	12,450,900
Oktober	17,900,200
November	16,500,300
Desember	17,086,109
Total	185,891,133

Sumber : Data diolah, 2017

Peredaran Usaha Bapak Budi pada Tabel 4.1 diatas didapat dari jasa perantara. Selain penghasilan yang dilaporkan Bapak Budi dalam SPT tahunan, Bapak Budi juga melaporkan harta. Berikut ini adalah harta yang dilaporkan Bapak Budi Dalam SPT tahunan 2012 :

Tabel 4.2

Harta dalam SPT 2012

No	Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Rumah di Jl. Siliwangi	2007	450.000.000
2	Mobil Jazz	2010	200.000.000
3	Mobil Kijang	2010	100.000.000
4	Tabungan	2010	50.000.000
	Total		800.000.000

Sumber : Data diolah, 2017

Harta yang telah dilaporkan oleh Bapak Budi dalam SPT tahunannya adalah rumah di jalan Siliwangi tahun perolehan 2007 dengan harga Rp 450.000.000, Mobil kijang dengan tahun

perolehan 2009 dengan harga Rp 100.000.000, memiliki tabungan dengan tahun perolehan 2010 senilai Rp 50.000.000 , dan memiliki mobil Jazz dengan tahun perolehan 2010 senilai Rp 200.000.000 total semua perolehan harta Bapak Budi adalah Rp 800.000.000

4.2 Identifikasi Kewajiban pajak Bapak Budi

Kewajiban perpajakan Bapak Budi sebagai seorang jasa pearantara adalah menyeter PPh pasal 25 setiap bulannya, serta melaporkan SPT tahunan paling lambat sebelum tanggal 31 maret setiap tahunnya.

4.2.1 Jenis kewajiban pajak Bapak Budi

Bapak Budi sebagai seorang jasa perantara sehingga memiliki kewajiban pajak bulanan yaitu menyeter PPh pasal 25 dan kewajiban pajak tahunan yaitu menyeter PPh pasal 29 serta melaporkan SPT tahunan paling lambat 31 maret tahun berikutnya. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. PPh pasal 25 berasal dari pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangkan dengan pajak penghasilan yang dipotong yaitu PPh pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut yaitu PPh pasal 22. Besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT tahunan PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Sedangkan PPh pasal 29 adalah pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh disampaikan.

4.2.2 Perhitungan pajak PPh pasal 29 oleh Bapak Budi

Penghitungan pajak Bapak Budi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Peredaran usaha tahun 2011	Rp 172.000.000,-
Penghasilan Neto (30% x Peredaran usaha tahun 2011)	Rp 51.600.000,-
PTKP (K/3)	
Wajib Pajak	= Rp 15.840.000,-
Kawin	= Rp 1.320.000,-
Tanggungan (3)	= Rp. 1.320.000,- x 3
	= <u>Rp 3.960.000,- +</u>
	<u>Rp 21.120.000,-</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 30.480.000,-
PPh Terutang 2011 = 5 % x 30.480.000,-	= Rp 1.524.000,-
Kredit pajak :	
- PPh pasal 25 =	<u>Rp 787.000,-</u>
PPh kurang bayar	<u>Rp 737.000,-</u>

Kewajiban pajak yang dilaporkan Bapak Budi dalam SPT tahun 2011 nya, dimana omset yang diperoleh pada tahun 2011 sebesar Rp 172.000.000 lalu dikalikan dengan norma jasa perantara sebesar 30% hasilnya adalah penghasilan neto, sebesar Rp. 51.600.000 setelah itu dikurangkan dengan PTKP K-3 sebesar Rp. 21.120.000,- hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar Rp 30.480.000 lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 5% hasilnya yaitu

Rp. 1.524.000,- setelah itu dikurangi PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2011 sebesar Rp. 787.000 kemudian hasilnya adalah PPh kurang bayar Rp. 737.000,-

PPh terutang pada tahun 2011 yaitu Rp 1.524.000,- dibagi 12 bulan hasilnya adalah Rp 127.000,- Itu adalah PPh pasal 25 yg harus dibayar setiap bulan selama Tahun 2012 oleh Bapak Budi. Sedangkan perhitungan pajak pada tahun 2012 Bapak Budi adalah sebagai berikut :

Peredaran usaha tahun 2012		Rp 185.191.133,-
Penghasilan Neto (30% x Peredaran usaha tahun 2012)		Rp 55.767.340,-
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	= Rp 15.840.000,-	
Kawin	= Rp 1.320.000,-	
Tanggungan (3)	= Rp. 1.320.000,- x 3	
	= <u>Rp 3.960.000,- +</u>	
		<u>Rp 21.120.000,-</u>
Penghasilan kena pajak		Rp 34.647.340,-
PPh Terutang 2012	= 5 % x 34.647.340,-	= Rp 1.732.367,-
Kredit pajak :		
- PPh pasal 25 =	<u>Rp 1.524.000,-</u>	
PPh kurang bayar	<u>Rp 208.367,-</u>	

Kewajiban pajak yang dilaporkan Bapak Budi dalam SPT tahun 2012 nya, dimana omset yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp 185.891.133 lalu dikalikan dengan norma jasa perantara sebesar 30% hasilnya adalah penghasilan neto, sebesar Rp. 55.767.340 setelah itu

dikurangi dengan PTKP K-3 sebesar Rp. 21.120.000 hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 34.367.340 lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 5% hasilnya yaitu Rp. 1.732.367 setelah itu dikurangkan PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp. 1.524.000,- kemudian hasilnya adalah PPh kurang bayar Rp. 208.367.

Tabel 4.3
Pajak yang harus dibayar oleh Bapak Budi 2012

Masa	PPh pasal 25	PPh pasal 29
Maret	127.000	
April	127.000	
Mei	127.000	
Juni	127.000	
Juli	127.000	
Agustus	127.000	
September	127.000	
Oktober	127.000	
November	127.000	
Desember	127.000	
Januari	127.000	
Februari	127.000	208.367
Total	1.524.000	208.367

Sumber : data diolah, 2017

Tabel 4.3 adalah rincian pajak yang harus dibayar oleh Bapak Budi selama tahun 2012, yaitu menyeter PPh pasal 25 setiap bulan sebesar Rp 127.000,- ,dari bulan maret 2012 sampai dengan februari 2013. PPh pasal 25 tersebut berasal dari penghitungan dalam SPT pada tahun 2011 yang dilaporkan pada bulan maret 2012, selain itu Bapak Budi menyeter PPh pasal 29 akibat kurang bayar SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2012 pada bulan februari 2013 sebesar Rp 208.367,-. Nominal tersebut didapat dari PPh terutang pada tahun 2012 sebesar Rp 1.732.367 ,- dikurangkan dengan PPh pasal 25 yang telah dibayar

oleh Bapak Budi dari masa maret 2012 sampai dengan februari 2013 yang tertera pada tabel 4.3 diatas jumlahnya adalah Rp 1.524.000,-. Sehingga kurang bayar PPh dalam SPT tahunan 2012 atau PPh pasal 29 adalah Rp 208.367,-

4.3 Implementasi Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan

Bapak Budi mendapatkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat tersebut berisi mengenai klarifikasi data menyatakan analisa dari KPP terdapat adanya ketidakwajaran penghasilan yang dilaporkan oleh Bapak Budi apabila dibandingkan dengan pengeluaran per bulan untuk menunjang biaya hidup dan biaya pemeliharaan aset serta properti yang dimiliki Bapak Budi. Berdasarkan data survey biaya hidup yang dikeluarkan oleh Badan pusat statistik minimal biaya hidup di kota semarang untuk tahun 2012 sebesar Rp 4.829.461 untuk empat anggota keluarga. Sementara Bapak Budi memiliki 3 orang anak usia sekolah serta melaporkan kepemilikan 2 buah unit mobil serta tanah dan bangunan. Berikut ini adalah perhitungan penghasilan dan pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Bapak Budi :

4.3.1 Perhitungan Pajak Bapak Budi

Perhitungan Pajak bapak Budi yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Peredaran usaha tahun 2012	Rp 193.178.440,-
Penghasilan Neto (30% x Peredaran usaha tahun 2012)	Rp 57.953.532,-
PTKP (K/3)	
Wajib Pajak	= Rp 15.840.000,-
Kawin	= Rp 1.320.000,-
Tanggungan (3)	= Rp. 1.320.000,- x 3
	= <u>Rp 3.960.000,- +</u>
	<u>Rp 21.120.000,-</u>

Penghasilan kena pajak **Rp 36.833.532,-**

PPh Terutang 2012 = 5 % x Rp 36.833.532,- = Rp 1.841.677,-

Kredit pajak :

- PPh pasal 25 = Rp 1.524.000 -

PPh kurang bayar **Rp 317.677,-**

Kewajiban pajak yang dilaporkan Bapak Budi dalam SPT tahun 2012 nya, dimana omset yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp 193.178.440 lalu dikalikan dengan norma jasa perantara sebesar 30% hasilnya adalah penghasilan netto, sebesar Rp. 57.953.532,- setelah itu dikurangi dengan PTKP K-3 sebesar Rp. 21.120.000,- hasilnya adalah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 36.833.532,- lalu dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 5% hasilnya yaitu Rp. 1.841.677,- setelah itu dikurangi PPh pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp. 1.524.000,- kemudian hasilnya adalah PPh kurang bayar Rp. 317.677,-

4.3.2 Penyetoran pajak Bapak Budi

Penyetoran pajak Bapak Budi yang telah disetor selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyetoran Pajak PPh Pasal 25 2012

Bulan	PPh pasal 25
Maret	127.000
April	127.000
Mei	127.000
Juni	127.000
Juli	127.000
Agustus	127.000
September	127.000
Oktober	127.000
November	127.000
Desember	127.000
Januari	127.000
Februari	127.000
Total	1.524.000

Sumber : Data diolah, 2017

Penyetoran pajak setiap bulan yang menjadi kewajiban Bapak Budi adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 selama tahun 2012 didapat dari pajak tehutang sebelum dikurangi dengan angsuran pajak yang dibayar sendiri pada tahun 2011 hasilnya dibagi 12 (Rp $1.524.000 : 12 = \text{Rp } 127.000,-$)

4.3.3 Pelaporan pajak Bapak Budi

Tanggal penyetoran pajak Bapak Budi selama tahun 2012 ada;ah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Tanggal penyetoran Pajak PPh pasal 25 2012

Bulan	Tanggal Pembayaran
Maret	06-Apr
April	10-Mei
Mei	02-Jun
Juni	04-Jul
Juli	14-Agust
Agustus	07-Sep
September	03-Okt
Oktober	08-Nop
November	11-Des
Desember	07-Jan
Januari	05-Feb
Februari	13-Mar

Sumber : Data diolah, 2017

Bapak Budi menyetor pajak PPh pasal 25 nya selalu tepat waktu, karena paling lambat setor PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dapat dilihat dari tabel 4.5 bahwa tanggal penyetoran PPh pasal 25 tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya.

Tabel 4.6

Rincian penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 Bapak Budi

Masa	Penyetoran			Pelaporan		
	Tanggal setor	Seharusnya	Keterangan	Tanggal lapor	Seharusnya	Keterangan
Maret	06/04/2012	15/04/2012	Sesuai	06/04/2012	20/04/2012	Sesuai
April	10/05/2012	15/05/2012	Sesuai	10/05/2012	20/05/2012	Sesuai
Mei	02/06/2012	15/06/2012	Sesuai	02/06/2012	20/06/2012	Sesuai
Juni	04/07/2012	15/07/2012	Sesuai	04/07/2012	20/07/2012	Sesuai
Juli	14/07/2012	15/08/2012	Sesuai	14/07/2012	20/08/2012	Sesuai
Agustus	07/09/2012	15/09/2012	Sesuai	07/09/2012	20/09/2012	Sesuai
September	03/10/2012	15/10/2012	Sesuai	03/10/2012	20/10/2012	Sesuai
Oktober	08/11/2012	15/11/2012	Sesuai	08/11/2012	20/11/2012	Sesuai
November	11/12/2012	15/12/2012	Sesuai	11/12/2012	20/12/2012	Sesuai
Desember	07/01/2013	15/01/2013	Sesuai	07/01/2013	20/01/2013	Sesuai
Januari	05/02/2013	15/02/2013	Sesuai	05/02/2013	20/02/2013	Sesuai
Februari	13/03/2013	15/03/2013	Sesuai	13/03/2013	20/03/2013	Sesuai

Sumber : data diolah, 2017

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 yang dilakukan Bapak Budi setiap bulannya selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, yaitu tidak terlambat karena belum melebihi tanggal 15 bulan berikutnya ntuk menyetor PPh pasal 25 dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk melaporkan PPh pasal 25.

Tabel 4.7

Rincian penyetoran dan pelaporan PPh pasal 29 Bapak Budi

Masa	Penyetoran			Pelaporan		
	Tanggal setor	Seharusnya	Keterangan	Tanggal lapor	Seharusnya	Keterangan
Desember	28/12/2012	31/03/2013	Sesuai	28/12/2012	31/03/2013	Sesuai

Sumber : data diolah, 2017

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa penyetoran dan pelaporan PPh pasal 29 yang dilakukan Bapak Budi pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

perpajakan yang berlaku, yaitu tidak terlambat karena belum melebihi tanggal 31 bulan maret tahun 2013 untuk menyetor dan melaporkan PPh pasal 29.

4.4 Kesesuaian Implementasi dengan Ketentuan

Tabel dibawah adalah perbandingan antara kewajiban pajak PPh pasal 29 yang telah dilakukan oleh Bapak Budi dan yang seharusnya dilakukan :

Tabel 4.8

Kesesuaian praktek pajak dengan ketentuan 2012

	YG DILAKUKAN	YG SEHARUSNYA
Peredaran usaha tahun 2012	185.891.133	193.178.440
Penghasilan Neto (30%)	55.767.340	57.953.532
PTKP	21.120.000	21.120.000
PKP	34.647.340	36.833.532
PPH Terutang	1.732.367	1.841.677
PPH Pasal 25	1.524.000	1.524.000
PPH Kurang Bayar (PPh 29)	208.367	317.677

Sumber : Data diolah, 2017

Perbandingan pajak yang telah dilakukan dan yang seharusnya dilakukan hanya berbeda pada peredaran usaha Bapak Budi pada tahun 2012, yang dilaporkan adalah Rp 185.891.133,- sedangkan yang seharusnya adalah Rp 193.178.440,- hal tersebut menyebabkan PPh kurang bayar pada perhitungan pajak yang seharusnya lebih besar daripada yang telah dilakukan Bapak Budi. Perbedaan tabel 4.7 diatas terletak pada peredaran usaha yang telah dilaporkan oleh Bapak Budi sebesar Rp 185.891.133,- sedangkan yang seharusnya dilaporkan adalah Rp 193.1478.440,- perbedaan tersebut dikarenakan pihak fiskus memberikan surat kepada Bapak Budi selaku wajib pajak yang berisi penghasilan yang dilaporkan Bapak Budi adalah tidak wajar karena terlalu kecil untuk membiayai hidupnya beserta keluarganya. Karena itu fiskus menyertakan biaya hidup minimal di Kota Semarang adalah Rp 4.829.461 setiap bulan. Sehingga Bapak Budi

harus melakukan pembetulan SPT dengan membenarkan penghasilan netto nya berdasarkan data Survey Biaya Hidup (SBH) di Kota Semarang tersebut dikali 12 bulan hasilnya adalah Rp 57.953.532.

4.5 Potensi

Potensi dari ketidaksesuaian praktek dengan ketentuan yaitu adanya selisih kurang bayar PPh sebesar Rp 109.310. Kurang bayar tersebut ada akibat keniakan penghasilan neto Bapak Budi. Kurang bayar sebesar Rp 109.310 harus dibayar beserta sanksi administrasinya yaitu berupa bunga sebesar 2% dikalikan dengan bulan keterlambatan lalu dikalikan dengan kurang bayarnya. Bapak Budi membayar kurang bayarnya tersebut pada tanggal 15 mei 2014. Sehingga perhitungan bunganya akibat kurang bayar tersebut adalah sebagai berikut :

Bunga = 2% x Pokok pajak x Bulan keterlambatan	
= 2% x 109.310 x 14	
= Rp 30.606	

Seharusnya pajak yang dibayar oleh Bapak Budi adalah Rp 317.677, Tetapi yang dibayar hanyalah Rp 208.367, sehingga Bapak Budi harus membayar kekurangannya yaitu sebesar Rp 109.310. Kurang bayar tersebut seharusnya dibayar pada saat SPT tahunan 2012 yaitu paling lambat pada tanggal 31 maret 2013, tetapi kenyatannya Bapak Budi membayar pajaknya tersebut pada tanggal 15 mei 2014 sehingga terlambat 14 bulan. Maka perhitungan Bunganya adalah 2% dikalikan dengan kurang bayar pajaknya dikalikan dengan 14 bulan.

Total Pajak Kurang bayar = Rp 109.310			
Bunga = Rp 30.606			
Jumlah = Rp 139.916			